



# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman  
<http://www.fisipundip.ac.id>

---

---

## HUBUNGAN TINGKAT SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK ETNIS KETURUNAN TIONGHOA DALAM PILWAKOT SEMARANG 2010

Heni Septi Wulandari<sup>1</sup>, Nunik Retno.N,S.Sos M.Si<sup>2</sup>,Drs.Purwoko,M.Si<sup>3</sup>  
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

### Abstract

*Based on the diversity of culture, ethnicity, race and religion in Indonesia The writers interest to describe the mindset of the Chinese ethnic political participation. It is indicates highest legitimate authority by the people, measured from their involvement in the democratic party (election). The results achieved in this study is to see the correlation of the socioeconomic level of the Chinese ethnic political participation in Semarang mayor election process (2010).*

*The methodology research used by the author is quantitative descriptive research, in order to look at the relationship between variables. Data was collected through questionnaires method according to the number of samples. The results provide an overview of data as a result of the overall conclusions regarding the overview of the socio-economic level, to the level of political participation of Chinese ethnic.*

*Results of this study shows that environmental factors and social status has affected their mindset to engage in political activities. The tendency of people choose to participate in a closed political, not following the political activities openly. They only participate by viewing and implement the system that has been determined by the political elite. It is supported on the grounds that their income was categorized low, so people prefer the subject not work on political activity or state.*

*Key words : Elections, Political Participation, Chinese Ethnicity, Social and Economic*

---

<sup>1</sup> Heni Septi Wulandari adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang alamat email : [henyseptiwulandari@yahoo.co.id](mailto:henyseptiwulandari@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

<sup>3</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

## **Abstraksi**

Berdasarkan kemajemukan budaya, etnisitas, ras dan agama di Indonesia melatarbelakangi penulis dalam menggambarkan pola pikir etnis tionghoa mengenai partisipasi politik. Hal ini merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan tertinggi yang absah oleh rakyat, diukur dari keterlibatan mereka pada pesta demokrasi (Pemilu). Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yakni ingin melihat korelasi mengenai tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi politik etnis tionghoa dalam pemilihan Walikota Semarang tahun 2010.

Metodelogi penelitian yang digunakan penulis disini adalah dengan menggunakan penelitian diskriptif kuantitatif, dengan format penelitian eksplanasi yakni penelitian yang ingin melihat hubungan antar variabel. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner sesuai jumlah sampel yang telah diperhitungkan. Hasil data tersebut memberikan gambaran umum sebagai hasil kesimpulan secara keseluruhan mengenai gambaran umum antara tingkat sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik etnis tionghoa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan status sosial telah mempengaruhi pola pikir mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik. Kecenderungan masyarakat memilih untuk berpartisipasi politik secara tertutup, tidak mengikuti kegiatan politik secara terbuka. Mereka hanya berpartisipasi dengan melihat dan melaksanakan system yang telah ditentukan oleh Elit Politik. Hal tersebut didukung dari alasan penghasilan mereka yang berada dikategori rendah, sehingga masyarakat lebih mengutamakan perihal pekerjaan bukan pada kegiatan politik atau kenegaraan.

Kata Kunci : Pemilu, Partisipasi Politik, Etnis Tionghoa, Sosial dan Ekonomi

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia ialah sebuah Negara yang berdaulat yang menganut paham demokrasi, yang salah satu asasnya ialah pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, bebas dan adil. Sejarah pemilu juga merupakan sebuah bukti dari bentuk aktualisasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang dilembagakan melalui berbagai proses dan instrument demokrasi tersebut. Partisipasi politik dalam Negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat di refleksikan dalam sikap golongan politik (golput) dalam pemilu. Sebagai arena kompetisi politik, pelaksanaan pemilu di Indonesia dari awal pasca kemerdekaan hingga sekarang banyak diwarnai oleh tarikan-tarikan kepentingan dari berbagai pihak, baik pada aktor politik maupun pada masyarakat.

Dengan demikian, adanya hal tersebut penulis membatasi masalah pada partisipasi politik pada etnis Tionghoa. Kehadirannya pada abad 9 masehi ke Indonesia dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik, meskipun memerlukan perjuangan dan kerja keras dalam mencapai hal tersebut, sedemikian suksesnya etnis tionghoa mencapai tingkat pembangunan dibidang ekonomi muncul asumsi bahwa pemegang perekonomian di Indonesia ialah dari etnis Tionghoa. Namun dilihat dari aspek politik keterlibatannya dalam politik dirasa masih rendah. Terbukti dengan tingkat partisipasi pemilih hanya sebesar 45,4% dari Data Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Semarang tengah dimana daerah ini memiliki jumlah etnis Tionghoa lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di kota Semarang.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang ada lingkup etnis tionghoa di dalam politik, melihat hal tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan apakah *ada hubungan antara tingkat sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi politik etnis keturunan tionghoa dalam Pilwakot Semarang 2010?*

## B. Kajian Teori

Pengertian tingkat sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan, pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Kemudian definisi dari status ekonomi atau tingkat ekonomi, menurut *Surbakti* “bahwa yang dimaksud status ekonomi ialah kedudukan seseorang di dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan”. *Sastroatmodjo* mengungkapkan: “status ekonomi adalah kedudukan seorang warga Negara dalam pelapisan sosial yang disebabkan oleh kepemilikan kekayaan”.(Sudjiono, 1995:15). Pemilikan kekayaan di dalam masyarakat sebagai dasar di dalam menentukan tinggi rendahnya status ekonomi individu di dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendekatan rasional yang berasumsi bahwa pemilih akan bertindak rasional dengan memberikan suara kepada calon yang memberi keuntungan sebesar-besarnya dan menekan kerugian sedikit mungkin. Pendekatan ini diambil dengan analogi antara pasar (ekonomi) dan partisipasi (politik). (Muhammad Afar, 1993: 16).

Menguraikan definisi masyarakat secara khusus dapat di artikan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu ras identitas bersama. (Koentjaraningrat, 2000:146)

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang sangat penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara-negara yang sedang berkembang. Meriam Budiharjo dalam bukunya yang berjudul demokrasi di Indonesia (Meriam Budiharjo, 2000:88) Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila Mendefinisikan Partisipasi Politik sebagai: *“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.”*

Dengan demikian secara konsep, garis besarnya bahwa partisipasi politik dibatasi menjadi beberapa hal, yaitu (1) Partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini tidak dimasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik dan keefektifan politik, tetapi yang ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan tindakan politik. (2) Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara biasa bukan pejabat-pejabat pemerintah, hal ini didasarkan pada pejabat yang memiliki pekerjaan profesional di bidang itu. (3) Kegiatan politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk mengagalkan keputusan, bahkan dengan cara mengubah aspek-aspek sistem politik. Padahal justru kajian ini mengacu pada warga Negara biasa. (4) Partisipasi juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. (5) Partisipasi politik dilakukan langsung atau tidak langsung, artinya langsung oleh pelakunya sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi ke pemerintah. (Sudijono, Sastrodmojo. 1995:74)

## **B. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan ataupun menganalisa data dengan perantara alat tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini penulis ingin melihat hubungan atau korelasi di antara variabel, yaitu variabel bebas (X) adalah tingkat ekonomi dan variabel terikat (Y) adalah tingkat partisipasi politik yang kemudian diuji melalui statistik. Oleh karena itu deskripsi kuantitatif dengan format penelitian eksplanasi dipilih sebagai alat menganalisa data pada penelitian ini. Metode ini menentukan populasi dan sampel, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner/angket, dan teknik analisa data dengan uji statistik menggunakan program SPSS.

### C. Hasil Penelitian

Menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran angket pada 83 responden, yaitu pemilih pada Pilwakot Semarang 2010 yang berada di tiga kelurahan dalam Kecamatan Semarang Tengah, yaitu Kelurahan Jagalan, Kranggan, dan Pekunden. Diperoleh data bahwa Perhitungan uji validitas dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*) seluruh item pertanyaan masing-masing mempunyai nilai *r* hitung positif dan lebih tinggi dari *r* tabel (0,2159), sehingga dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan variabel partisipasi politik masyarakat valid.

Selanjutnya untuk uji reabilitas diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Variabel	<i>Cronbach alpa</i>	>/<	Alpha kritis	Kesimpulan
Partisipasi politik masyarakat	0,875	>	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menunjukkan variabel partisipasi politik masyarakat mempunyai nilai *cronbach alpa* lebih tinggi dari alpha kritis (0,60). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan variabel partisipasi politik masyarakat reliabel.

Untuk melakukan uji korelasi digunakan bantuan program SPSS yang hasilnya dapat disajikan dalam tabel Uji korelasi, sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

Correlations		Tingkat sosial ekonomi (X)	Partisipasi politik masyarakat (Y)
Tingkat sosial ekonomi (X)	Pearson Correlation	1	.618**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	83	83
Partisipasi politik masyarakat (Y)	Pearson Correlation	.618**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	83	83

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel 1.2 diperoleh nilai korelasi (*r*) sebesar 0,618 (dengan tanda positif), dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai korelasi sebesar 0,618 (dengan tanda positif) menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi memiliki arah hubungan positif dengan partisipasi politik masyarakat, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, maka tingkat partisipasi politik etnis keturunan Tionghoa dalam pemilihan Walikota Semarang 2010 akan semakin meningkat. Dari hasil tersebut juga menggambarkan bahwa tingkat sosial ekonomi memiliki hubungan kuat dengan partisipasi politik masyarakat. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai lebih rendah dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) menggambarkan tingkat sosial ekonomi memiliki

hubungan yang signifikan (erat) dengan tingkat sosial ekonomi, maka tingkat partisipasi politik etnis keturunan Tionghoa dalam pemilihan Walikota Semarang 2010 berhubungan.

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi politik etnis tionghoa, dideskripsikan dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Uji t**

Variabel	t hit	t tab	Sig t
Tingkat sosial ekonomi	7,082	1,9893	0,000

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

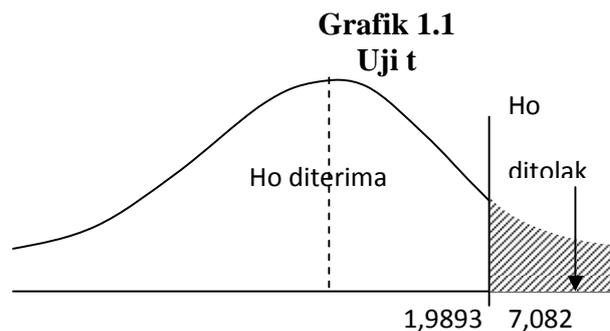
Rumusan Hipotesis :

Ho :  $b_1 = 0$ , tidak ada hubungan signifikan tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat

Ha :  $b_1 > 0$ , ada hubungan signifikan tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat

Hasil perhitungan statistik bahwa variabel tingkat sosial ekonomi (X) diperoleh nilai t hitung sebesar 7,082 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan df (*degree of freedom*) sebesar 82 (83-1) diperoleh nilai t tabel sebesar 1,9893. Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai t hitung  $7,082 > t$  tabel 1,9893 yang mana nilai ini mengindikasikan adanya hubungan tingkat sosial ekonomi (X) terhadap partisipasi politik masyarakat (Y). Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan yang lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) menggambarkan hubungan yang signifikan atau bermakna tingkat sosial ekonomi (X) terhadap partisipasi politik masyarakat (Y). Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan “ada hubungan signifikan tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat” dapat diterima.

Secara grafis pengujian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan nilai t hitung lebih tinggi dari t tabel ( $7,082 > 1,9893$ ), sehingga t hitung berada di daerah penolakan Ho, yang artinya hipotesis yang menyatakan “ada hubungan signifikan tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat” dapat diterima.

Hasil data diatas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi politik pada etnis keturunan tionghoa berhubungan dengan tingkat social dan ekonomi, dimana hasil data menunjukkan bahwa status social masyarakat tersebut berada pada kategori menengah ke

bawah dengan penghasilan kurang dari Rp. 2.500.000-, dengan kondisi perekonomian seperti saat ini. Sehingga secara status social yang minim masyarakat etnis Tionghoa lebih cenderung berfikir rasional untuk terlibat dalam kegiatan politik atau kegiatan kenegaraan. Secara mayoritas masyarakat pun pada umumnya berpartisipasi politik secara tertutup dan tidak terjun secara langsung dalam kegiatan politik maupun kegiatan pemilihan umum. Dimana mereka lebih berorientasi kepada pekerjaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi politik etnis tionghoa di kecamatan Semarang Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sebagian besar penduduk wilayah kecamatan Semarang Tengah adalah pedagang dan bekerja pada di sektor swasta yang menyebabkan status sosial ekonomi mereka termasuk kategori menengah ke bawah, dilihat dari situasi ekonomi di Indonesia yang belum stabil seperti saat ini.
- 2) Di dalam lingkungan masyarakat etnis Tionghoa sesuai dengan hasil penelitian bahwasannya masyarakat etnis Tionghoa sudah cukup andil dalam berpartisipasi politik, hanya saja mereka berpartisipasi secara tertutup dengan tidak mengikuti kegiatan politik secara terbuka. Hal itu yang dianggap sebagai cara yang paling aman menurut mereka dalam berapresiasi pada kegiatan politik atau kegiatan kenegaraan. Dan pada umumnya masyarakat lebih mengutamakan waktunya untuk perihal pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dibandingkan untuk mengikuti kegiatan politik maupun kegiatan pemilihan umum (pemilu), anggota/pengurus partai politik dan sebagainya.
- 3) Masyarakat etnis Tionghoa wilayah kecamatan Semarang tengah menjatuhkan pilihan politiknya didukung beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, selanjutnya faktor sosiologi yang ada pada masyarakat etnis tionghoa, berdasarkan informasi yang mereka terima melalui media/iklan politik serta pengetahuan yang diperoleh tentang profil partai, figur caleg serta visi dan misi kandidat ternyata berkorelasi dengan kondisi lingkungan dimana mereka tinggal, serta di dukung dengan faktor psikologis masyarakat etnis tionghoa sebagian menentukan pilihan politiknya dengan memilih kandidat yang dilihat/dianggap mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka sebagai warga etnis tionghoa.
- 4) Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi menunjukkan ada hubungan antara variabel X (tingkat sosial ekonomi) dengan variabel Y (partisipasi politik), dengan nilai korelasi ( $r$ ) sebesar 0,618 (dengan tanda positif). Sedangkan dari hasil signifikansi menunjukkan nilai 0,000 lebih rendah dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) yang menggambarkan tingkat sosial ekonomi memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pilwakot kota Semarang 2010. Hasil tersebut juga diperkuat dengan nilai  $t$  hitung lebih tinggi dari  $t$  tabel ( $7,082 > 1,9893$ ), sehingga  $t$  hitung berada di daerah penolakan  $H_0$  yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat, dengan demikian dinyatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan data yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa hasil korelasi sebesar 0,618 menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi memiliki arah

hubungan positif dengan partisipasi politik masyarakat, yang artinya kedua variabel tersebut berhubungan sesuai dengan kategori interpretasi koefisien korelasi. Serta dengan adanya keterbatasan penghasilan yang masih minim dengan tingkat status social yang berada pada kategori menengah, membuat tingkat partisipasi politik etnis Tionghoa termasuk pada tingkat partisipan, yang artinya masyarakat tidak memiliki nilai yang cukup tinggi dalam berpartisipasi politik maupun pemahaman akan nilai-nilai politik, dengan latar belakang tingkat sosial dan ekonomi yang masih minim atau menengah kebawah.

## **F. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Secara status sosial dan ekonomi khususnya dalam hal pekerjaan masyarakat etnis tionghoa sebagian besar bermatapencahariaan sebagai pengusaha atau bergerak pada bidang swasta, kecenderungan untuk menjadi pejabat publik maupun pegawai negeri sipil masih sangat minim. Hal ini menarik untuk dikaji dalam penelitian berikutnya.
- 2) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di wilayah kecamatan Semarang tengah mengenai hubungan tingkat sosial ekonomi terhadap partisipasi politik etnis tionghoa, menggambarkan partisipasi politik pada kelompok mereka sudah cukup signifikan walaupun masih dalam kategori partisipasi yang masih tertutup. Tidak hanya tertutup dalam kegiatan politik, namun karakteristik mereka yang unik. Maka diharapkan untuk penelitian berikutnya harus lebih teliti dan melakukan pendekatan secara khusus untuk lebih bisa beradaptasi dalam masyarakat tersebut.
- 3) Dari hasil temuan dilapangan bahwasannya mereka menjatuhkan pilihan politik berdasarkan tiga factor, yakin factor lingkungan, sosiologis dan psikologis. Dari factor-faktor tersebut, perlu adanya sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih luas, supaya dalam hal ini masyarakat diharapkan lebih paham dan selektif dalam menentukan pilihan politik serta memahami akan nilai-nilai politik sehingga tidak asal berpartisipasi.
- 4) Mengenai hal tingkat sosial ekonomi yang berpengaruh pada tingkat partisipasi politik, memberikan wacana agar dalam mengembangkan aspek politik tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, namun ada factor-faktor lain yang mempengaruhi antara lain aspek ekonomi dan aspek sosial. Sehingga diharapkan dalam hal ini bisa saling membantu agar ketiga pokok aspek ini bisa berjalan dengan seimbang.
- 5) Berdasarkan hasil olah data yang telah dipaparkan sebelumnya, mengenai keterkaitan antara dua variabel X (tingkat sosial ekonomi) dan Y (partisipasi politik) menggambarkan bahwa kedua hal tersebut ada hubungan yang signifikan, namun masih perlu kajian yang mendalam untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dan untuk penelitian selanjutnya agar bisa melihat bahwa tidak hanya faktor sosial dan ekonomi saja yang bisa diukur dalam partisipasi politik karena keterbatasan penulis sehingga tidak bisa mengkaji secara keseluruhan mengenai hal tersebut.

## Daftar Pustaka

- Affar, Muhammad. 1993. Beberapa pendekatan dalam memahami perilaku memilih. Dalam jurnal ilmu politik. Vol. 16. Jakarta. Gramedia pustaka utama
- Benny, G. Setyono. Tionghoa dalam Pusaran Politik. 2002. Elkasa. Jakarta
- Budiharjo, Meriam. Demokrasi di Indonesia: demokrasi pancasila dan demokrasi parlementer.
- Budi, suryadi. 2007. Sosiologi Politik, sejarah, definisi dan perkembangan Konsep.IRCISOD: Yogyakarta
- Coppel, Charles.A. Tionghoa Indonesia dalam Krisis. 1994. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Dan Nimmo. 2006. Komunikasi politik, khalayak dan efek. Jakarta. Remaja rosdakarya.
- Gatara Dan Said,Sosiologi Politik:Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian.2007. Pustaka Setia. Bandung.
- Gaffar, affan. Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi. 2005. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Surbakti, Ramlan. Memahami Politik. 2003. Grasindo. Jakarta
- Habib, achmad. Konflik Antar Etnik Di Pedesaan. 2009. Yogyakarta. PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Huntington P. Samuel, Nelson Joan. Partisipasi politik di Negara berkembang. 1994. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Joko, J. Prihatmoko.2008. Mendemostrasikan Pemilu Dari System Sampai Elemen Teknis. Pustaka Pelajar.Yogyakarta
- Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu antropologi. Jakarta. Rineka cipta.
- Lipset, Seymour martin.Political man: Basis social tentang politik. 2007. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muhammad, asfar. 2004. Presiden golput. Jakarta. Jawa pos.
- Oommen. 2009. Kewarganegaraan. Kebangsaan dan etnisita. Yogyakarta. Kreasi wacana.
- Pramoedya, Ananta, Toer. Hoakiau di Indonesia. 1998. Garba Budaya. Jakarta
- Ramlan, Surbakti. 1992. Memahami ilmu politik. Jakarta. Grasindo.
- Semarang Sepanjang jalan Kenangan.editor: Djawahir, Muhammad.1996.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

- Usman, A. Rani. 2009. Etnis Cina di Perantauan Aceh. Kompas harian 1998. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro. 1996. PT. RajaGrafindo. Jakarta.
- Satroatmodjo, Sudjiono. Perilaku politik. 1995. IKIP Press. Semarang.
- Sudijono, Sastroadmojo. 1995. Perilaku politik. Semarang. IKIP press.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Suryadinata, Leo, Negara dan etnis tionghoa (kasus Indonesia). 2002. LP3ES. Jakarta
- Vany andra Negara. Pengaruh tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap orientasi pemilih dalam Pilkada di kabupaten semarang. Skripsi FISIP UNDIP tidak diterbitkan.